

IDENTITAS SOP PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA</p>	<p>Nomor SOP: B-000.8.3.3/ 2208 /KEC.SGT.U-02</p> <p>Tanggal Pembuatan: 02 Januari 2024</p> <p>Tanggal Revisi: -</p> <p>Tanggal Efektif: 02 Januari 2024</p> <p>Disahkan oleh: Camat</p> 
SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nama SOP
Dasar Hukum	Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>